

BAB II

PENGARUH KEMERDEKAAN TERHADAP POSISI KERATON KASEPUHAN CIREBON

2.1 Keraton Kasepuhan Cirebon sebelum Kemerdekaan

2.1.1 Perkembangan Awal Keraton Kasepuhan

Keraton Kasepuhan didirikan pada tahun 1529 oleh Pangeran Mas Mochammad Arifin II, yang merupakan keturunan dari Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Awalnya, keraton ini dikenal dengan nama Keraton Pakungwati, diambil dari nama Ratu Dewi Pakungwati, putri dari Pangeran Cakrabuana (pendiri Cirebon) yang menikah dengan Sunan Gunung Jati. Pendirian keraton ini menandai awal mula berdirinya Kesultanan Cirebon sebagai pusat pemerintahan yang berdaulat. Keraton Pakungwati kemudian berkembang menjadi pusat kekuasaan politik dan keagamaan yang penting di wilayah tersebut. Sunan Gunung Jati, sebagai tokoh sentral dalam Kesultanan Cirebon, memiliki pengaruh besar dalam membentuk sistem pemerintahan dan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat Cirebon.²⁸

Keraton Kasepuhan merupakan kelanjutan dan perkembangan dari Keraton Pakungwati Cirebon, sebab pada saat itu Keraton Pakungwati adalah keratonnya raja-raja Cirebon dimulai dari Pangeran Cakrabuana. Letak Keraton Pakungwati ini tidaklah luas dan penyebutannya hanya sebagai “Dalem Agung” yang berada di

²⁸ A. Sobana Hardjaputra, Talawinuddin Haris, Dkk, Cirebon dalam Lima Zaman (Abad ke-15 Hingga Pertengahan Abad ke-20), Jawa Barat: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, 2011, hlm. 99

bagian timur laut kompleks Keraton Kasepuhan. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Djati,²⁹ Keraton Pakungwati diperluas dengan masih menggunakan nama Pakungwati sampai masa pemerintahan Panembahan Ratu II (Girilaya). Karena sepeninggalan Girilaya banyak terjadi konflik yang membuat keraton tersebut terpecah dan memiliki sebutan masing-masing. Setelah adanya konflik tersebut itu, keraton baru dibagi dua yaitu Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman.³⁰ Luas kompleks keraton ini adalah 16 hektar, namun tidak termasuk Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan Alun-alun. Meskipun demikian, kedua tempat tersebut masuk ke dalam bagian dari Keraton Kasepuhan.³¹

Keraton Kasepuhan Cirebon ini merupakan bagian dari tiga wilayah hasil pembagian Kesultanan Cirebon kepada tiga orang putra Sultan Abdul Karim atau Pangeran Girilaya yang lebih dikenal dengan nama Panembahan Ratu Pakungwati II yang wafat pada tahun 1666. Putra dari Pangeran Girilaya adalah Pangeran Raja Kartawijaya yang memerintah Kesultanan Kanoman serta Pangeran Raja Wangsakerta yang menjadi panembahan Cirebon yang bertugas dalam hal pendidikan putra-putri keraton. Wangsakerta bertempat tinggal di Keraton Kasepuhan dan membantu Martawijaya untuk memerintah Kasepuhan sebagai Sultan Sepuh I.³²

Setelah pembagian wilayah Cirebon, Kasepuhan dipimpin oleh anak pertama Pangeran Girilaya yang bernama Pangeran Syamsudin Martawidjaja yang

²⁹ Paramita R. Abdurahman, Cirebon, Yayasan mitra budaya indonesia, 1982: 73

³⁰ Wawancara dengan Bapak Iman Sugiman, 19 Februari 2025, Keraton Kasepuhan Cirebon

³¹ Euis Thresnawaty, Inventarisasi Peninggalan Kerajaan-Kerajaan di Cirebon, Bandung: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1999, hlm. 14

³² Eka, Edi Suherdi, Polemik Naskah Pangeran Wangsakerta, Bandung: Pustaka Jaya, hlm. 62

dinobatkan sebagai sultan sepuh I dari 1679-1697 dan yang terakhir yang menyandang sebagai Sultan Sepuh adalah Adipati Arief Natadiningrat dari tahun 2010-2020.³³

Keraton Kasepuhan Cirebon sebagai salah satu keraton tertua di Indonesia yang memainkan peran sentral dalam memperkaya budaya Cirebon. Keraton ini menjadi warisan budaya yang berharga bagi masyarakat Cirebon sekaligus menjadi simbol kebanggaan dan identitas budaya kota Cirebon. Sebagai pusat pemerintahan, Keraton Kasepuhan menjadi saksi bisu dari perkembangan dan perubahan Cirebon selama berabad-abad. Nilai sejarah yang dimiliki oleh Keraton Kasepuhan Cirebon terlihat dari keberadaannya sebagai pusat kekuasaan dan pemerintahan Kerajaan Cirebon.

2.1.2 Keraton Kasepuhan di Masa Kolonial

Sharon Siddique, seorang ahli sejarah, menawarkan periodisasi yang berbeda dari Ricklefs dalam memahami peta politik Cirebon di masa kolonial. Siddique membagi sejarah Cirebon menjadi dua periode utama: 1570-1681 dan 1681-1940. Menurutnya, kedua periode ini sangat dipengaruhi oleh interaksi Cirebon dengan kerajaan-kerajaan Islam, kerajaan-kerajaan lokal yang sudah ada sebelumnya, serta kedatangan bangsa-bangsa Eropa.³⁴ Periode pertama (1570-1681) ditandai dengan keberlanjutan Kesultanan Cirebon setelah wafatnya Sunan Gunung Jati. Pada masa ini, Kesultanan Cirebon mengalami dinamika politik yang kompleks, mulai dari kemandiriannya sebagai sebuah kesultanan, hingga menerima pengaruh dari

³³ Wawancara dengan Bapak Iman Sugiman, 19 Februari 2025, Keraton Kasepuhan Cirebon

³⁴ Sharon Siddique, "Relics of the Past? A Sociological Study of the Sultanates of Cirebon West Java", Disertasi pada Universitas Bielefeld, 1977, hlm. 21

Mataram, pengaruh kuat administrasi VOC di Priangan, serta menjalin komunikasi dengan kesultanan Demak dan Banten. Sementara itu, periode kedua (1681-1940) memperlihatkan peta politik Kesultanan Cirebon yang semakin terpengaruh oleh penetrasi kolonial. Siddique mencatat bahwa fase-fase kolonisasi dimulai sejak perjanjian pertama antara Kesultanan Cirebon dengan VOC pada tahun 1681.³⁵

Namun, periodisasi yang ditawarkan oleh Siddique ini mendapatkan kritik dari beberapa Sejarawan. Mereka menyebutkan bahwa kolonisasi terhadap kepulauan Nusantara, khususnya Jawa, baru benar-benar terjadi setelah kejatuhan VOC yang diakibatkan oleh resesi perekonomian pada akhir abad ke-18. Meskipun terdapat perbedaan pendapat terkait periodisasi, satu hal yang pasti adalah bahwa nasib Islamisasi di Cirebon mengalami pasang surut setelah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, terutama pada era pemerintahan kompeni dan kolonisasi Belanda. Peran kesultanan yang sebelumnya berfungsi sebagai pusat studi Islam dengan berbagai tantangan dan perubahan situasi dalam mempertahankan eksistensinya.³⁶

Masa kolonial merupakan periode yang penuh tantangan bagi Keraton Kasepuhan. Kedatangan bangsa Eropa, khususnya Belanda melalui *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), membawa perubahan besar dalam lanskap politik, ekonomi, sosial, dan budaya Cirebon. Intervensi VOC dan pemerintah kolonial Hindia Belanda secara bertahap mengikis kekuasaan dan otonomi Keraton Kasepuhan, namun juga memicu berbagai bentuk adaptasi dan perlawanan dari pihak keraton. Adanya ikut campur dalam pemerintahan VOC di Kesultanan

³⁵ Ibid, hlm. 22.

³⁶ Ibi Satibi, 2013, Nilai-nilai Islam dalam Hukum Adat Pepakem (Studi Atas Kitab Adilulah Kesultanan Cirebon). IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hlm. 57-58

Cirebon membuat kesultanan tidak nampak lagi sebagai otoritas kekuasaan di sana. Sultan di Cirebon pada saat itu sudah tidak lagi menjadi pemimpin satu-satunya di kesultanan terkecuali dalam hal keagamaan, kebudayaan, serta perdagangan. Hal ini yang mengakibatkan posisi sultan dalam kesultanan menjadi melemah eksistensinya di kalangan masyarakat.³⁷

Sejak abad ke-17, VOC mulai menancapkan pengaruhnya di Cirebon, memanfaatkan persaingan internal di antara para pewaris takhta untuk memperkuat posisinya. VOC terlibat dalam urusan suksesi kesultanan, seringkali mendukung kandidat yang dianggap lebih menguntungkan bagi kepentingan mereka. Pada abad ke-18 Cirebon dikuasai oleh VOC dan pada saat itu juga Pangeran Arya merupakan kaki tangan dari VOC untuk mengawasi para bupati di kawasan Priangan.

Puncaknya, pada tahun 1677, VOC berhasil memecah Kesultanan Cirebon menjadi tiga kesultanan yang lebih kecil yaitu Kasepuhan, Kanoman, dan Cirebon yang kemudian dikenal sebagai Kacirebonan. Daerah kekuasaan masing-masing kesultanan berbeda-beda seperti Kesultanan Kasepuhan yang meliputi wilayah Kota Cirebon, Cirebon bagian Timur (Kabupaten Cirebon dan Brebes Jawa Tengah), Cirebon bagian Selatan (Kuningan-Galuh Ciamis) yang dipimpin oleh Pangeran Martawijaya dengan gelar Sultan Sepuh Abdul Makarimi Muhammad Syamsudin (1679-1697).³⁸ Kebijakan *divide et impera* (pecah belah dan kuasai) ini bertujuan untuk melemahkan kekuatan politik Cirebon dan memudahkan VOC dalam mengendalikan wilayah tersebut. Perjanjian-perjanjian yang dipaksakan oleh VOC

³⁷ Susanti, L. (2018). Pengaruh Kolonial Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Cirebon Tahun 1752-1830. Jurnal Prodi Ilmu Sejarah. Hlm 276.

³⁸ Atja. (1986). Carita Purwaka Caruban Nagari : Karya Sastra sebagai Sumber Pengetahuan Sejarah. Proyek Pengembangan Permuseuman Jawa Barat. Hlm 74.

kepada para sultan Cirebon semakin membatasi otonomi mereka. VOC memegang kendali atas perdagangan, militer, dan kebijakan luar negeri Cirebon. Para sultan harus mendapatkan persetujuan dari VOC untuk setiap tindakan penting yang mereka ambil. Hal ini membuat Keraton Kasepuhan, seperti keraton-keraton Cirebon lainnya, kehilangan sebagian besar kedaulatannya dan menjadi semacam negara vasal³⁹ di bawah kekuasaan VOC.⁴⁰

Alih-alih melakukan stabilitasi politik, ketiga kekuasaan tersebut justru menjadikan segala kepengaturan pemerintahan kerajaan di Cirebon selalu atas dasar pertimbangan tiga kekuatan politik, terutama dalam urusan internal kerajaan. Kondisi sejak 1688 hingga awal abad ke-18 mendorong VOC untuk mengeluarkan resolusi pada 21 Desember 1708. Resolusi tersebut memberikan wewenang kepada penguasa lokal, seperti bupati di Priangan dan residen Cirebon, untuk mengadili dan menghukum rakyat yang melakukan tindak pidana. Ketentuan ini kemudian menjadi acuan hukum yang berlaku bagi para penguasa lokal di wilayah tersebut.⁴¹

Pada masa penjajahan Belanda, Keraton Kasepuhan mengalami pengaruh signifikan dari pemerintah kolonial. Hal ini terutama terlihat dalam perubahan struktur pemerintahan Keraton Cirebon. Sebelumnya, pada masa pemerintahan Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati), Keraton Cirebon hanya memiliki satu pemerintahan, yaitu Keraton Pakungwati. Namun, kebijakan *divide et impera* yang diterapkan oleh Belanda menyebabkan perpecahan keraton menjadi dua, yaitu

³⁹ Negara Vasal atau negara bawahan adalah negara yang secara internasional berada di bawah kekuasaan negara lain.

⁴⁰ Susanti, L op.cit., hlm. 176

⁴¹ Mason C. Hoadley, *Selective Judicial Competence: The Cirebon-Priangan Legal Administration 1680-1792* (Ithaca, New York: Southeast Asia Program, 1994), hlm. 4-6.

Keraton Kasepuhan dan Keraton Kanoman. Kedua keraton ini dipimpin oleh dua sultan bersaudara, dengan Sultan Sepuh memimpin Keraton Kasepuhan dan Sultan Anom memimpin Keraton Kanoman. Akibatnya, aset keraton yang semula tunggal terbagi menjadi dua kepemilikan yang terpisah. Salah satu tokoh penting pada masa ini adalah Sultan Syafiudin (Sultan Sepuh V) yang dikenal dengan gelar "Matangaji". Beliau dikenal gigih dalam perlawanan terhadap Belanda dan ahli dalam ilmu panuragan, sehingga mendapat julukan Sultan Matangaji yang berarti memiliki ajian yang matang.⁴²

Masuknya pemerintah kolonial Belanda membawa perubahan signifikan dalam struktur dan fungsi Keraton Kasepuhan. Fungsi sultan pada masa itu masih dipertahankan, namun dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial.⁴³ Peran keraton dalam bidang politik dan pemerintahan mengalami penyusutan, sementara peran dalam bidang budaya dan adat istiadat masih dipertahankan. Perubahan ini mencerminkan strategi Belanda untuk mengendalikan kekuasaan lokal tanpa menghilangkan sepenuhnya legitimasi keraton di mata masyarakat.

2.1.3 Keraton Kasepuhan di Masa Kemerdekaan

Peran aktif Keraton Cirebon dalam perjuangan kemerdekaan tidak terlihat secara langsung. Namun, berbagai perlawanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Cirebon diduga kuat merupakan perintah dari Sultan. Dugaan ini didasarkan pada fakta bahwa para pejuang yang tertangkap atau menyerah kepada penjajah

⁴² Wawancara dengan Bapak Iman Sugiman, 19 Februari 2025, Keraton Kasepuhan Cirebon

⁴³ Ibid

melakukannya karena adanya ancaman penghancuran keraton. Dengan demikian, penyerahan diri para pejuang tersebut bertujuan untuk melindungi keraton dari kehancuran, yang mengindikasikan adanya peran tersembunyi keraton dalam mengarahkan perjuangan.

Selain itu, perjuangan di Cirebon juga dilakukan oleh para ulama yang memilih untuk menyembunyikan identitas kebangsawanan mereka agar tidak dikenali oleh penjajah. Para ulama ini mendirikan pesantren dan terus melakukan perlawanan terhadap penjajah. Beberapa tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan di Cirebon antara lain:

- 1) Ki Bagus Rangin, Seorang ulama dan pemimpin perlawanan rakyat Cirebon melawan penjajah Belanda pada tahun 1808-1813. Ia juga dikenal sebagai tokoh yang berdakwah untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan moral agama di kalangan masyarakat Cirebon. Ki Bagus Rangin juga merupakan abdi dalem Keraton.⁴⁴
- 2) KH Abbas Abdul Jamil, Keturunan Mbah Muqoyyim, pendiri Pondok Pesantren Buntet. Ia merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam perang 10 November di Surabaya, dan dijuluki "Singa dari Jawa Barat". Mbah Muqoyyim sendiri memiliki silsilah sampai ke Keraton Cirebon.

Keraton Cirebon juga berpartisipasi dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi Belanda dan sekutunya. Salah satu contohnya adalah pertempuran laut di Teluk Cirebon pada 5 Januari 1947, yang melibatkan

⁴⁴ Favianio Farhan, Winny Gunarti Widya Wardani, and Febrianto Saptodewo, "Karakter Tokoh Ki Bagus Rangin Pahlawan Perang Kedondong di Cirebon," *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya* 2, no. 02 (April 30, 2020): 96–102

kapal perang Republik Indonesia (KRI) Gadjah Mada 408 yang berhadapan dengan kapal perang Belanda. Para awak KRI Gadjah Mada 408 gugur sebagai pahlawan dalam pertempuran tersebut. Mereka berhasil menenggelamkan satu kapal Belanda dan melukai dua kapal lainnya, meskipun kapal mereka sendiri juga tenggelam akibat serangan balik Belanda. Perlawanan para awak kapal ini menunjukkan sikap patriotisme. Mereka rela mati demi negara dan masa depan bangsanya, karena merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memajukan negaranya.⁴⁵

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh lokal, seperti ulama dan pejuang dari Cirebon, juga terlibat dalam perjuangan kemerdekaan. Hal ini menunjukkan sikap patriotisme dari rakyat Cirebon kepada Negara Indonesia yang baru berdiri. Patriotisme adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Patriotisme merupakan jiwa dan semangat cinta tanah air yang melengkapi eksistensi nasionalisme.

Keterlibatan para ulama dalam perjuangan kemerdekaan menunjukkan pentingnya peran mereka dalam politik Islam. Mereka mengesampingkan status sosial demi kemerdekaan untuk semua lapisan masyarakat. Perjuangan rakyat Cirebon tidak terbatas pada golongan bangsawan atau elit, tetapi melibatkan semua kalangan masyarakat, baik ulama, pedagang, maupun rakyat biasa. Perlawanan terhadap Belanda melalui perang terbuka seperti perang kancil merah dan perang

⁴⁵ Sungaidi, M., & Ghozali, A. Peran Keraton Cirebon dalam Pembentukan Identitas Nasional pada Masa Kemerdekaan Indonesia: Analisis Politik Islam dan Nilai Nasionalisme. *Refleksi*, 2024, 23(2). Hlm. 240

kedondong menunjukkan bahwa masyarakat Cirebon bergerak secara kolektif untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia.

2.2 Struktur Pemerintahan Keraton Kasepuhan Cirebon

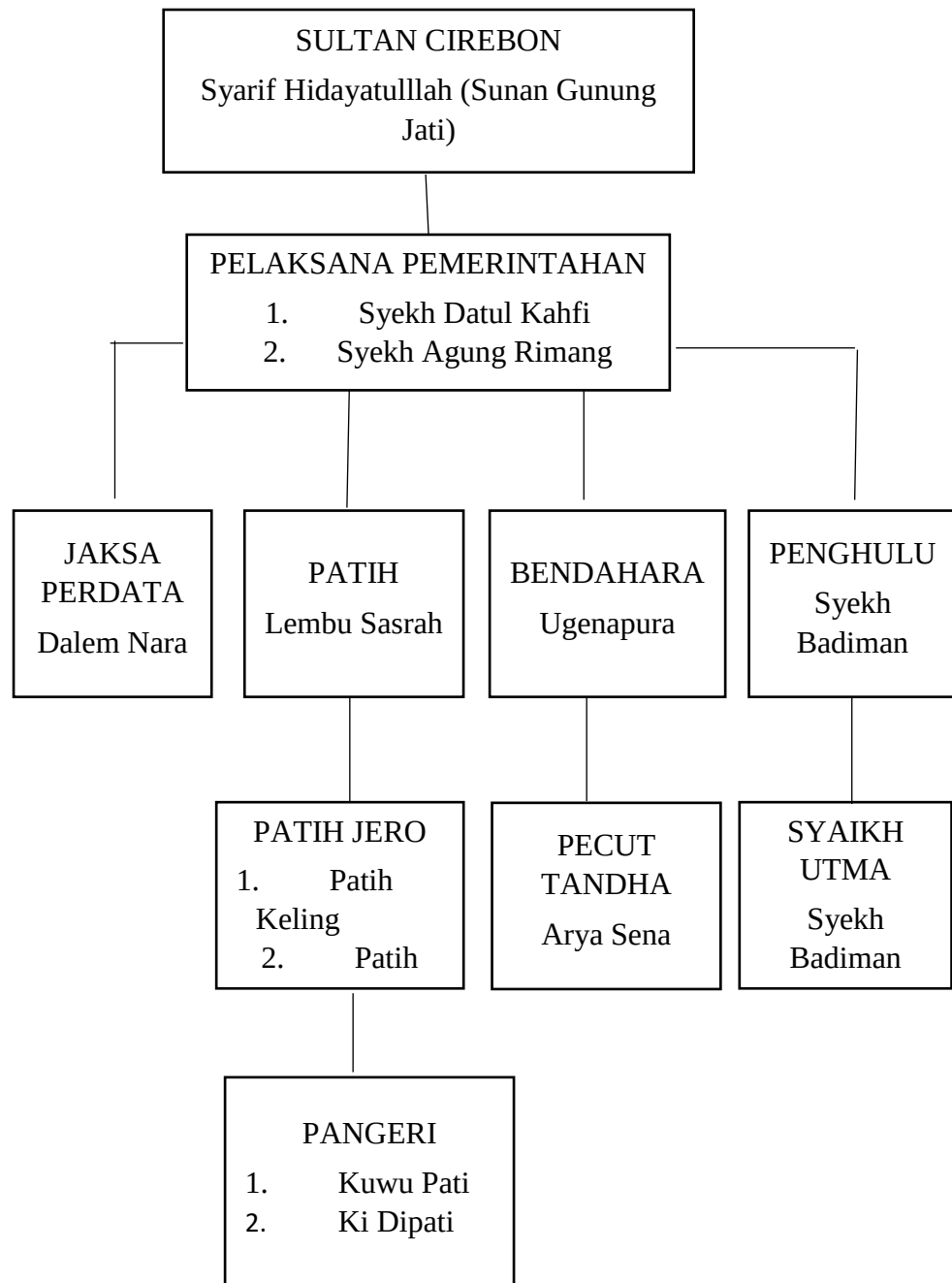
2.2.1 Struktur Pemerintahan Keraton Kasepuhan sebelum Kemerdekaan

Berdasarkan sumber sejarah yang menjelaskan tentang struktur pemerintahan dan tokoh-tokoh penting pada masa Sunan Gunung Jati, diketahui bahwa beliau mengambil langkah strategis dengan mengangkat beberapa pejabat dan ulama dari berbagai daerah untuk membantu menjalankan pemerintahan dan mengatur kehidupan masyarakat. Penjelasan lengkap mengenai tokoh-tokoh tersebut adalah sebagai berikut:

Atas kehendak Sunan Gunung Jati, maka beliau mengangkat Jaksa Perdata yang berasal dari Pajajaran, bernama Dalem Nara yang tinggal di Taraju. Dalem Nara dikenal akan kebijaksanaannya serta sifatnya yang tidak mementingkan keduniawian. Yang memegang pemerintahan serta mengatur kebijakan-kebijaksanaan di Dalem Pakungwati adalah Kyai Syekh Datuk Khapi yang adil dan bijaksana, dia diangkat sebagai Penghulunya, dibantu oleh Syekh Agung Rimang. Yang bertindak sebagai Syekh Utama ialah Pekih Makdum seorang Modin sejati. Syekh Badiman menjabat sebagai Penghulu, sebagai seorang yang luas pengetahuan agamanya. Adapun yang diangkat menduduki Kepatihan, Lembu Sasrah namanya yang bersal dari Pajajaran, dengan dibantu oleh beberapa orang Patih Jero, yaitu: Patih Keling, Patih Kering dan Patih Montas. Yang menjadi Pangeri adalah Kuwu Patih yang berdudukan di Dawuhan. Ki Dipati yang berasal dari Demak menjadi Kepala pasukannya dan yang menjadi Pecat Tanda bernama Arya Sena dari Banten asalnya, adapun yang memegang keuangan bernama Ugenapura, dialah yang mengetahui mengenai keuangan. Pada waktu itu di Jawa, uang tembikar telah berganti dengan uang picis dari timah ...⁴⁶

⁴⁶ Amman N. Wahyu, Sejarah Wali Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati (Naskah Mertasinga), (Bandung: Penerbit Pustaka, 2005), hlm. 89.

Bedasarkan nama-nama pejabat dan jabatannya pada masa Sunan Gunung Jati yang terdapat dalam naskah di atas, kemudian dijadikan bagan struktur pemerintahan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Pemerintahan Awal Kesultanan Kasepuhan

Struktur pemerintahan keraton pada abad ke-15 dan 16 sangat terorganisir dengan baik karena strukturnya mencerminkan upaya Sunan Gunung Djati dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam sistem pemerintahan tradisional Jawa. Sultan menjadi pemimpin tertinggi yang berperan sebagai kepala negara dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, menetapkan kebijakan, dan stabilitas kerajaan. Mencakup juga peran spiritual sebagai pemimpin agama yang menegaskan pentingnya Islam dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat Cirebon.

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 membawa perubahan signifikan terhadap posisi dan fungsi Keraton Kasepuhan Cirebon, yang sebelumnya berada di bawah sistem kolonial Belanda dengan status *Gouvernementslanden*.⁴⁷ Dalam sistem kolonial tersebut, keputusan politik di wilayah Cirebon ditetapkan langsung oleh Gubernur Jenderal di Batavia, berbeda dengan keraton lain seperti Yogyakarta dan Surakarta yang memiliki otonomi lebih besar sebagai *Vorstenlanden*.⁴⁸ Sejak 1815, kekuasaan politik Keraton Kasepuhan sudah dilikuidasi dan digantikan oleh para bupati, sehingga keraton lebih berperan sebagai simbol tradisional dan budaya tanpa kekuasaan politik nyata.⁴⁹

Di masa kini, Keraton Kasepuhan Cirebon memiliki dua struktur organisasi yang berjalan secara paralel. Pertama, struktur tradisional yang berlaku secara

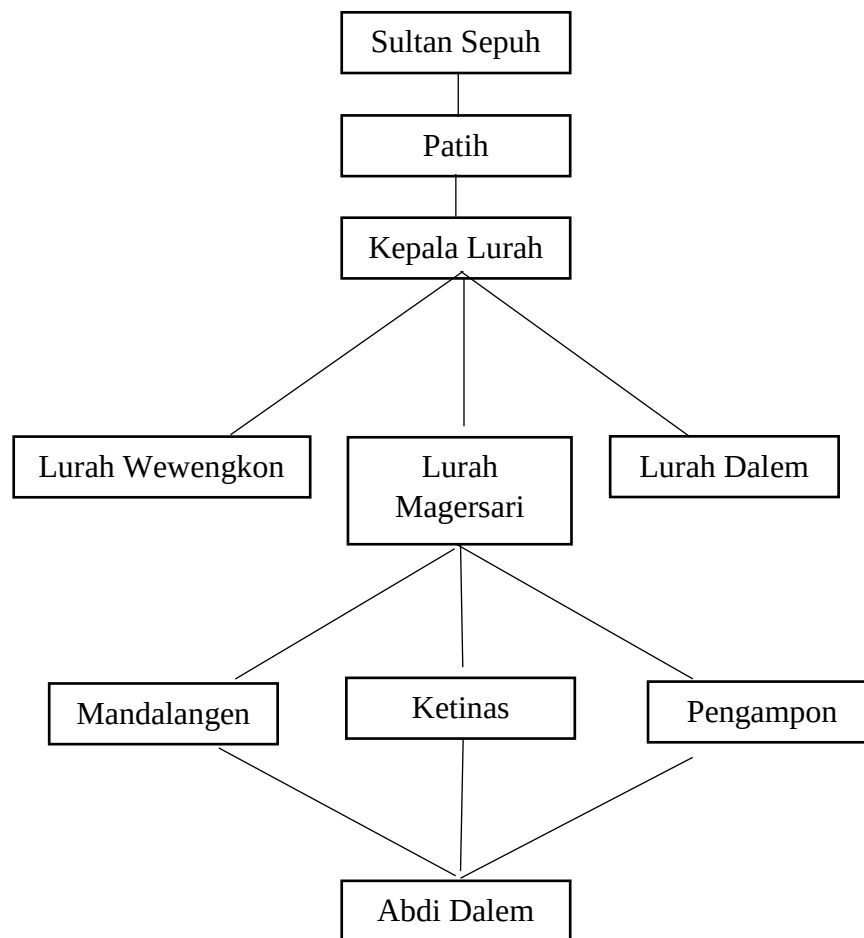
⁴⁷ Dalam bahasa Indonesia: Negara-Negara Pemerintahan yang mengacu pada wilayah-wilayah yang berada dibawah kontrol langsung oleh pemerintah kolonial, yang artinya pemerintah kolonial memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahan, administrasi, dan hukum di wilayah tersebut

⁴⁸ Istilah yang digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk menyebut wilayah-wilayah kerajaan di Jawa Tengah, khususnya Kesultanan Surakarta. Istilah ini secara harfiah berarti: Tanah-Tanah Kerajaan

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Mustaqim, tanggal April 2025, di kediamannya di Kab. Cirebon

internal di kalangan keraton, di mana Sultan sebagai pemimpin tertinggi yang berperan sebagai kepala negara dan pemimpin spiritual, yang menegaskan pentingnya Islam dalam kehidupan politik dan sosial masyarakat Cirebon. Kedua, struktur manajemen modern yang dikenal sebagai Badan Pengelola Keraton Kasepuhan (BPKK),⁵⁰ yang mengelola urusan sehari-hari seperti pemeliharaan keraton, pelaksanaan kegiatan adat, serta penerimaan tamu dari tingkat regional, nasional, hingga internasional. Struktur BPKK ini berada di bawah pengawasan Sultan dan melibatkan kerabat keraton, sekaligus berfungsi sebagai lembaga pengelola resmi yang diakui pemerintah. Berikut adalah struktur organisasi tradisional Keraton Kasepuhan:

⁵⁰ Ahmad Fajar Nugraha, 2017, Pola komunikasi pemangku jabatan keraton kasepuhan dengan pejabat pemerintah Kota Cirebon (Bachelor's thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, hlm. 40



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Tradisional Keraton Kasepuhan

Struktur pemerintahan Keraton Kasepuhan ini sama halnya dengan struktur kerajaan-kerajaan pada masa lalu seperti sifatnya yang hierarkis. Sultan yang menjadi pemimpin keraton memiliki otoritas yang paling tinggi dalam kekuasaan. Seluruh kebijakan yang berlaku di keraton, baik urusan dalam maupun luar keraton haruslah berasal dari Sultan.⁵¹

Berbeda dengan struktur organisasi yang mungkin hanya melibatkan pihak internal, struktur organisasi manajemen BPKK (Badan Pengelola Keuangan dan

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Iman Sugiman, 19 Februari 2025, Keraton Kasepuhan Cirebon

Kekayaan) memiliki cakupan yang lebih luas. Tidak hanya melibatkan pejabat pemerintah kota, seperti Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat serta Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon.⁵²

Dengan demikian, setelah kemerdekaan, Keraton Kasepuhan bertransformasi dari lembaga yang kehilangan kekuasaan politik menjadi institusi yang mengedepankan fungsi budaya, spiritual, dan sosial. Sultan tetap memegang peran sentral sebagai simbol kepemimpinan tradisional dan agama, sementara pengelolaan operasional keraton dijalankan oleh BPKK untuk menjaga kelestarian warisan budaya dan menjalankan fungsi keraton dalam konteks modern. Perubahan ini mencerminkan adaptasi keraton terhadap dinamika politik nasional dan kebutuhan pengelolaan yang profesional, sekaligus mempertahankan nilai-nilai tradisional yang menjadi identitas masyarakat Cirebon

2.3 Dampak Proklamasi Kemerdekaan terhadap Keraton Kasepuhan

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 memberikan dampak yang signifikan terhadap Keraton Kasepuhan Cirebon, memengaruhi peran strategis sebagai pelestari budaya dan simbol identitas masyarakat Cirebon. Identitasnya kuat sebagai warisan sejarah dan budaya yang memadukan unsur Jawa, Islam, dan lokal. Hubungan keraton dengan negara dan masyarakat terus berkembang dari masa kolonial hingga era kemerdekaan dan modern, menjadikan

⁵² Pemerintah Kota Cirebon, Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2021 (Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, Cirebon: Pemerintah Kota Cirebon, 2021

keraton sebagai institusi budaya yang relevan dan dihormati dalam konteks nasional.

Selain itu, Keraton Kasepuhan Cirebon aktif terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sultan pada saat itu dan masyarakat Cirebon menyadari pentingnya menjadi bagian dari gerakan kemerdekaan. Keraton memfasilitasi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan di Cirebon pada 15 Agustus 1945, satu hari sebelum proklamasi resmi di Jakarta sebagai gladi.⁵³ Hal ini mencerminkan kesadaran sultan dan masyarakat Cirebon akan pentingnya menjadi bagian dari gerakan kemerdekaan yang lebih luas. Sultan memahami bahwa kepentingan nasional lebih penting dibanding kepentingan kerajaan. Pada masa kemerdekaan, sultan memainkan peran penting dalam mempercepat gerakan kemerdekaan di Cirebon seperti memberikan tempat dan dukungannya bagi proklamasi kemerdekaan di Tugu Kejaksan Cirebon pada 15 Agustus 1945 dua hari sebelum proklamasi di Jakarta. Sikap ini memperlihatkan rasa tanggung jawab nasional yang tidak hanya di wilayah Cirebon, tetapi juga terhadap kesatuan bangsa Indonesia yang baru.⁵⁴

Proses gladi proklamasi yang dilakukan oleh Dr. Sudarsono pada sore hari tanggal 15 Agustus 1945 direncanakan karena para pejuang di Cirebon sudah berkumpul, dan masyarakat menunggu berita dari Jakarta mengenai pembacaan teks proklamasi. Dari Cirebon, terdapat utusan yang dikirim ke Jakarta, yaitu Sastosuwiryo, namun belum ada kabar yang diterima. Menurut seorang wartawan

⁵³ Wawancara dengan Bapak Iman Sugiman, 19 Februari 2025, Keraton Kasepuhan Cirebon

⁵⁴ Sungaidi, M., & Ghozali, A op.cit., hlm. 239

pada masa revolusi fisik bernama Rosian Anwar, proklamasi dibacakan oleh Dr. Sudarsono karena tidak ada pilihan lain. Pada saat itu, mereka tidak ingin terjadi kekecewaan atau pembubaran massa secara sia-sia. Pembacaan proklamasi tersebut melibatkan sekitar 50 orang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh pergerakan, pemuda, serta perwakilan dari Keraton Kasepuhan. Mereka berkumpul di alun-alun Kejaksan dan kemudian menyatakan sikap yang dikenal sebagai Proklamasi Cirebon.⁵⁵

Pada tahun 1946, setelah pengakuan kemerdekaan, daerah Cirebon termasuk Keraton Kasepuhan terlibat dalam konsolidasi kekuatan republik. Perlawanan terhadap Belanda di Cirebon terus berlanjut di mana keraton tetap menjadi simbol perlawanan dan pusat aktivasi kebudayaan serta politik lokal. Pada masa ini upaya mempertahankan kemerdekaan dilakukan melalui kerja sama yang erat antara berbagai elemenn masyarakat.. Keraton Kasepuhan secara konsisten mendukung pemerintahan Republik Indonesia yang tercermin dari adanya konsolidasi kekuatan dan dukungan moral yang diberikan kepada para pejuang dan masyarakat yang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Kerjasama antara tentara, laskar, dan masyarakat Cirebon didukung oleh semangat kebangsaan yang diperkuat oleh peran strategis keraton sebagai pusat kebudayaan dan simbol persatuan.⁵⁶

2.4 Perubahan Posisi Sosial dan Politik Keraton Kasepuhan

Pada masa kejayaannya, keraton ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Cirebon. Selain menjadi pusat kekuasaan politik, Keraton Kasepuhan

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Mustaqim Asteja, 28 April 2025, Kediannya di Kab. Cirebon

⁵⁶ Ike Pustakaningrat, Cirebon di Masa Revolusi: Dari Linggarjati Hingga Pengakuan Kedaulatan, Universitas Indonesia, 2000, hlm 238

juga memainkan peran penting dalam penyebaran agama islam di wilayah Jawa Barat khususnya di wilayah Cirebon dan sekitarnya.⁵⁷ Seiring dengan melemahnya kekuasaan Kesultanan yang diakibatkan dari adanya kolonialisme Belanda serta adanya perubahan sistem pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan, fungsi dan posisi Keraton Kasepuhan ini mengalami perubahan yang signifikan.

2.4.1 Perubahan Posisi Sosial Keraton Kasepuhan

Perubahan posisi sosial Keraton Kasepuhan dapat dilihat dari beberapa aspek seperti adanya pergeseran fungsi keraton, transformasi peran sosial, dan bagaimana hubungan keraton ini dengan masyarakat. Pada masa lalu, Keraton Kasepuhan berfungsi sebagai pusat kehidupan masyarakat Cirebon dan tidak hanya sebagai tempat tinggal raja beserta keluarganya, tetapi juga menjadi pusat administrasi pemerintahan, pendidikan agama, dan kegiatan kebudayaan. Fungsi keraton mulai mengalami perubahan seiring dengan adanya intervensi kolonial Belanda pada abad ke-19. Fungsi administratifnya telah digantikan dengan pemerintahan modern di bawah kendali pemerintahan daerah Kota Cirebon. Meski demikian, keraton tetap menjadi simbol identitas masyarakat Cirebon dan berperan dalam menjaga tradisi lokal.

Perubahan posisi sosial Keraton Kasepuhan juga terlihat dari transformasi peran pada anggota keluarga keraton. Zaman dulu, anggota keluarga keraton memiliki status sosial yang sangat tinggi di masyarakat karena dianggap sebagai keturunan bangsawan atau darah biru, namun di era modern status sosial tidak lagi

⁵⁷ Husein, F 2007, Sejarah Cirebon, Yayasan Kebudayaan Cirebon

menjadi penentu utama dalam kehidupan masyarakat.⁵⁸ Anggota keluarga keraton setelah kemerdekaan Indonesia dan tidak lagi menjadi penguasa hanya terlibat pada beberapa kegiatan publik tertentu saja seperti dalam pendidikan dan budaya. Beberapa bahkan ada yang memilih untuk bekerja di luar lingkungan keraton. Hal tersebut menunjukkan adanya adaptasi terhadap perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisional.

Setelah bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia, keraton mulai terbuka terhadap masyarakat umum dibandingkan dengan dulu ketika akses masuk keraton sangat terbatas dan hanya kalangan tertentu saja yang dapat masuk. Acara-acara budaya yang digelar secara rutin seperti Grebeg Syawal, peringatan Maulid Nabi, dan festival budaya dilakukan lebih terbuka dan melibatkan masyarakat lokal maupun wisatawan. Keterbukaan ini mencerminkan upaya Keraton Kasepuhan untuk tetap relevan di tengah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat modern. Selain itu, keraton juga berperan aktif dalam mendukung program-program pemerintah.

2.4.2 Perubahan Posisi Politik Keraton Kasepuhan

Salah satu perubahan paling mencolok dalam posisi politik Keraton Kasepuhan adalah hilangnya kekuasaan formal sebagai institusi pemerintahan. Setelah Kesultanan Cirebon berada di bawah kendali Belanda pada abad ke-19, kekuasaan politik keraton secara bertahap dilemahkan hingga akhirnya hanya

⁵⁸ Geertz, H. (1961). *The Javanese Family: A Study of Kinship and Socialization*. Penerbit: The Free Press of Glencoe.

berfungsi sebagai simbol budaya dan agama.⁵⁹ Pasca-kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sistem pemerintahan berbasis kesultanan tidak lagi diakui secara formal oleh negara. Hal ini menempatkan Keraton Kasepuhan pada posisi yang lebih subordinat dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki otoritas administratif resmi.

Meskipun tidak lagi memiliki kekuasaan politik formal, Keraton Kasepuhan tetap memiliki pengaruh simbolik yang kuat dalam politik modern Indonesia. Banyak tokoh politik nasional maupun daerah mengunjungi keraton untuk mendapatkan dukungan moral atau legitimasi simbolis dari Sultan Keraton Kasepuhan. Pada masa pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden, kunjungan ke Keraton Kasepuhan sering kali dijadikan bagian dari strategi kampanye politik untuk menarik simpati masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak lagi berkuasa secara langsung, keraton tetap memiliki nilai strategis dalam konteks politik modern.

Perubahan posisi sosial dan politik Keraton Kasepuhan mencerminkan dinamika sejarah yang kompleks antara tradisi dan modernitas. Dari pusat pemerintahan kesultanan hingga menjadi pusat pelestarian budaya dan simbol legitimasi politik modern, perjalanan panjang ini menunjukkan kemampuan keraton untuk beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitasnya.

Melalui keterlibatan aktif dalam pelestarian budaya serta kolaborasi dengan pemerintah daerah, Keraton Kasepuhan berhasil mempertahankan relevansinya di

⁵⁹ Van Niel, R. (1960). *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*. Penerbit: W. van Hoeve. Hlm 235

tengah tantangan globalisasi dan modernisasi. Dengan demikian, keraton tidak hanya menjadi saksi bisu sejarah tetapi juga aktor penting dalam membangun masa depan budaya Indonesia.